

MODUL 7

PENDIDIKAN POLITIK

Dalam kehidupan masyarakat, hampir orang tidak bisa membedakan, antara politik, dan kekuasaan. Politik dan korupsi (uang), politik dan kebohongan, politik dan intervensi. Hal ini disebabkan oleh proses pembodohan politik yang selama ini terjadi pada masyarakat. Politik tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama namun lebih dari itu sebagai usaha untuk meraih “kekuasaan” dengan jalan mengintervensi dan memanipulasi. Masyarakat yang kurang terdidik secara politik, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elite politik. Akibatnya terjadi disintegrasi lokal, dimana antar kelompok masyarakat, dan atau antar massa pendukung pasangan/calon tertentu saling sikut-menyikut karena beda pilihan politik (perbedaan pilihan politik tidaklah dianggap lumrah). Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki tujuan utama yang saling mendukung satu sama lain. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan pada diri individu terdidik¹⁰⁶. Sedangkan politik berkenaan dengan praktik

¹⁰⁶ Sudiarja, *Agama (Di Zaman) Yang Berubah* (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua perangkat aktivitas yang akan terus saling terkait dan berinteraksi.

Pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya¹⁰⁷. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan politik dimaksudkan agar dapat membentuk kepribadian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- **Pengertian Pendidikan Politik**

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pendidikan dan politik memiliki makna yang berbeda namun saling bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat. Kata politik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani; politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikembangkan pengertian politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk mencerdaskan manusia lain melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Dari penjelasan kedua istilah tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang

¹⁰⁷ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1988).

hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik mengemukakan bahwa pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki kesamaan dalam istilah¹⁰⁸. Dalam bahasa Inggris kedua istilah ini memang sering disamakan. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, di dalam pendidikan politik terjadi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik dalam tulisan ini dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Definisi pendidikan politik ini mengandung tiga anasir penting, yakni: Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan di maksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga,

¹⁰⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (Kognisi), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (Afeksi) dan mewujudkan kecakapan (Psikomotorik) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

• **Landasan Hukum Pendidikan Politik**

Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Landasan ideologis yakni Pancasila.
- Landasan konstitusi yakni UUD 1945.
- Landasan operasional yakni GBHN.
- Landasan historis yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Landasan di atas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting karena warga negara terutama kaum muda harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945.

• **Tujuan Pendidikan Politik**

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan.

Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi Generasi Muda menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya dalam aspek kognitif, wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Singkat kata pendidikan politik dapat membentuk kepribadian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

➤ **Pendidikan politik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat**

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik mengisyaratkan akan pembentukan kepribadian seseorang melalui pendidikan politik. Di sana dijelaskan bahwa Kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses pendewasaannya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan.

Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.

- **Pendidikan politik membentuk kesadaran berpolitik masyarakat**

Kualitas demokrasi Indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam berpolitik. Menurut Surbakti kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara¹⁰⁹. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan¹¹⁰. Terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik¹¹¹. Apabila individu memiliki kesadaran politik maka individu tersebut akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Selain sadar akan posisinya, ia juga akan menaruh perhatian terhadap proses-

¹⁰⁹ Ramlan Surbakti.

¹¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 3rd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1978).

¹¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

proses politik dan pemerintahan yang berlangsung. Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi politik dan pemerintahan terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses tersebut.

Wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh melalui metode dialog dan pengajaran langsung kepada masyarakat.

- **Pendidikan politik membentuk partisipasi berpolitik masyarakat**

Partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Seorang pemilih bisa saja hanya menggunakan hak pilihnya, namun sebenarnya dia hanya asal memilih tanpa sebuah kesadaran akan akibat lanjut dari pilihannya. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Dia sungguh menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa. Partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Selain itu pembinaan politik dapat dilakukan melalui aktivitas pembinaan pemikiran berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Pemikiran itu haruslah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh yang mampu memancarkan sistem hidup, atau biasa disebut dengan ideologi. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki gambaran yang jelas tentang sistem hidup yang akan diterapkan, dan siapa yang pantas untuk menjalankannya.

Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Apalagi jika hal ini dilandasi oleh kesadaran atas hubungannya dengan Tuhan yang mewajibkannya untuk memikirkan urusan

masyarakat. Tidak akan ada hambatan dan ancaman yang akan menghentikannya. Tidak akan ada bujukan, rayuan yang akan memalingkannya. Maka terciptalah social control yang berasal dari people power yang cerdas dan bermoral. Dalam kondisi seperti ini, perubahan dari kehidupan 'gelap' menuju 'terang' tinggal menunggu waktu. Dari masyarakat seperti ini juga akan lahir pemimpin-pemimpin yang mumpuni dan amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil dan beradab.

- **Penyelenggara pendidikan politik**

Pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah: siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan politik, lembaga manakah yang berhak/pantas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat? Tentu banyak orang akan berpikir dan mengatakan, yang paling berhak adalah partai politik. Partai politik memang memiliki kewajiban moral dan juga tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat alasannya adalah partai politik merupakan pilar penyangga demokrasi dalam hal ini partai politik, sesuai dengan undang-undang No.2 tahun 2008 untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain partai politik, lembaga-lembaga formal pemerintah seperti sekolah dan perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan demi kemajuan bangsa dan negara. Peran media massa dan lembaga atau asosiasi dalam masyarakat tidak kalah penting untuk mengajarkan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengambil bagian berdemokrasi secara bebas dan bertanggung jawab. Selain itu dapat memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik.

Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dan semua bentuk yang disuguhkan di atas sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Apabila diasosiasikan dengan bentuk politik yang tertera di atas, maka menurut penulis yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan politik terletak pada penyelenggaraan bentuk pendidikan politik yang terakhir yaitu melalui jalur lembaga atau asosiasi dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis sangat sependapat bila pendidikan politik lebih ditekankan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan politik formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui lembaga resmi (sekolah).

• RANGKUMAN

Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik . bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik . sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga dapat berperan menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan

hak dan kewajibannya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga Negara yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Tuntunan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga negara mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika masyarakat.

TES FORMATIF

• PILIHAN GANDA

7. Tujuan dari Pendidikan Politik adalah sebagai berikut, kecuali...
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat
 - f. Meningkatkan partisipasi politik
 - g. Agar menjadi warga negara yang baik
 - h. Supaya meningkatkan persaingan dan konflik

8. Institusi dan perangkat yang menopangnya berjalannya pendidikan politik adalah, kecuali ...:
 - e. Keluarga
 - f. Sekolah
 - g. Partai Politik
 - h. Gank

9. Perkembangan zaman apabila tidak dibarengi dengan kesiapan mental generasi muda, akan membawa kehidupan bebas tanpa kendali, disinilah salah satu peranan dari pendidikan politik dalam menangkal bahaya globalisasi dan

teknologi, berkaitan dengan pernyataan ini pendidikan politik dapat dikatakan sebagai :

- e. Filter terhadap pengaruh burukl
 - f. Sumber konflik
 - g. Sebagai asesoris
 - h. Salah semua
10. Pendidikan politik memiliki unsur penting, yaitu :
- e. adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri
 - f. perbuatan di maksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin
 - g. perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara
 - h. Semua benar
11. Peranan dari pendidikan politik adalah :
- e. Menyiapkan anak bangsa mengeluti kehidupan sosial
 - f. Agar masyarakat dapat menunaikan hak dan kewajibannya
 - g. Mentranfer nilai-nilai kepada generasi muda secara terus menerus
 - h. Semua benar
12. Media yang dapat digunakan untuk pendidikan politik adalah, kecuali :
- e. Radio dan TV
 - f. Internet
 - g. Telepati
 - h. Film

- **LATIHAN**

6. Partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik yang diperoleh melalui pendidikan politik, jelaskan pernyataan ini secara rinci dan konkrit!
7. Pendidikan politik mampu mempersiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah maksud dari pernyataan ini?
8. Pendidikan Politik dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, kenapa demikian?
9. Menurut Surbakti, terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik, jelaskan kedua variable dimaksud !